

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan fokus analisis *political will* dalam upaya mengatasi angka kekerasan terhadap anak oleh DP3APPKB Surabaya, yang diukur menggunakan indikator dari Brinkerhoff (2015). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Inisiatif Pemerintah**

DP3APPKB Surabaya mencegah kekerasan anak melalui program PUSPAGA dan menangani korban melalui UPTD PPA dengan pendampingan psikologis. Berdasarkan wawancara dengan fasilitator, DP3APPKB Surabaya perlu lebih aktif dalam sosialisasi dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, mengingat kesadaran yang masih kurang.

##### **2. Prioritas**

Penggunaan dana secara proporsional untuk berbagai kegiatan serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran menunjukkan keberlanjutan prioritas mereka dalam melindungi anak-anak. Maka dalam hal ini, alokasi biaya untuk keperluan mendukung berbagai kegiatan perlindungan anak dengan total anggaran dana sebesar Rp180.340.219 yang dialokasikan pada tahun 2023 berdasarkan APBD Surabaya Tahun 2023.

### 3. Mobilisasi dukungan politik

DP3APPKB Surabaya aktif berkoordinasi dengan berbagai stakeholder seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polrestabes Surabaya, OPD, dan LSM. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Surabaya, diwakili oleh Sekretaris Daerah, menguatkan agenda pencegahan kekerasan terhadap anak. Salah satu upaya DP3APPKB untuk mengatasi peningkatan kekerasan terhadap anak adalah menggelar capacity building bagi Relawan PKBM Kecamatan, Satgas PPA Kelurahan, TPPK di Satuan Pendidikan, dan Fasilitator Puspaga Balai RW.

### 4. Komitmen publik dan alokasi sumber daya

DP3APPKB Surabaya mengelola SDM dengan baik dalam menangani kasus kekerasan anak. Kepala dinas mengoordinasikan kegiatan dan kebijakan perlindungan anak, sementara PJ Mediasi, PJ Pengaduan Masyarakat, dan PJ Penampungan Sementara menangani tahap awal kasus. Selanjutnya, PJ Pengelolaan Kasus, PJ Rentan Putus Sekolah, PJ Penjangkauan Korban, dan PJ Pendampingan Korban mengambil peran. Meskipun ada tantangan seperti penolakan melaporkan kasus, DP3APPKB Surabaya tetap fokus pada partisipasi aktif kader Balai RW dan kerjasama dengan instansi terkait untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak.

### 5. Penegakan Hukum

DP3APPKB Surabaya dalam melaksanakan pendampingan hukum sesuai peraturan dan SOP. Pelaku dewasa dikenakan pidana, sedangkan

pelaku di bawah umur mendapatkan pendampingan dan pembinaan di rehabilitasi. DP3APPKB berkolaborasi dengan kepolisian untuk mediasi jika kasus tidak memerlukan tindakan pidana. Meskipun tidak memiliki ahli hukum dan shelter khusus perempuan, DP3APPKB memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Tantangan seperti kurangnya ahli hukum dan kesulitan komunikasi dengan korban anak menyoroti perlunya pendekatan dan kerjasama erat.

#### 6. Kontinuitas Usaha

Dengan mengikuti Renstra dan agenda pembangunan jangka panjang, DP3APPKB memastikan keberlanjutan perlindungan anak. Melalui kolaborasi, kebijakan, dan pemantauan berkala, mereka berkomitmen memperbaiki kondisi perlindungan anak. Fasilitas seperti shelter dan layanan konseling menunjukkan perhatian pada korban kekerasan. Program seperti kelas Calon Pengantin (catin) yang selaras dengan visi jangka panjang menegaskan komitmen DP3APPKB Surabaya dalam menciptakan lingkungan ramah anak.

#### 7. Adaptasi dan Belajar

DP3APPKB Surabaya akan menyesuaikan langkah dan strategi sesuai dinamika kekerasan anak yang terjadi. DP3APPKB Surabaya juga terus mengevaluasi program melalui penyusunan Rencana Strategis dan evaluasi pelaksanaan. Selain itu, DP3APPKB Surabaya juga menyediakan aplikasi SIAP-PPAK sebagai layanan pengaduan online untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Surabaya.

Dari seluruh indikator yang sudah dijabarkan, DP3APPKB Surabaya tidak hanya berhenti pada inisiatif pemerintah saja. Namun, juga terdapat kontinuitas usaha hingga adaptasi dan belajar. Meskipun belum sempurna karena masih naiknya angka kekerasan terhadap anak di Surabaya, tetapi kemauan baik DP3APPKB Surabaya yang dinilai Masyarakat lebih serius daripada sebelumnya dapat membuktikan kredibilitas dan kualitas pemerintah secara baik. Dengan demikian, *political will* DP3APPKB Surabaya telah menunjukkan bahwa DP3APPKB Surabaya betul-betul berkomitmen untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana ditinjau melalui indikator *political will* dari Brinkerhoff (2015).

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran untuk pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. DP3APPKB Surabaya sudah melakukan yang terbaik selama ini, namun diperlukan menargetkan sosialisasi yang menyeluruh hingga ke seluruh kelurahan di Surabaya, memperkuat komunikasi dengan OPD dan LSM, adanya ahli hukum sendiri dari DP3APPKB dan juga membangun shelter bagi perempuan, memperkuat *capacity building*, mensosialisasikan dan mengoptimalkan aplikasi SIAP-PPAK sehingga masyarakat Surabaya mengetahui aplikasi tersebut, dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program yang telah dilaksanakan.
2. Masyarakat Surabaya perlu memberikan dukungan yang lebih besar dengan aktif melaporkan kasus kekerasan, mendukung program-program

sosialisasi, berperan aktif dalam membangun lingkungan yang aman, dan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak serta memberikan dukungan moral kepada korban kekerasan dan keluarganya.

3. Untuk melengkapi upaya preventif, saksi yang relevan seperti guru, kader masyarakat, dan petugas kesehatan perlu dilibatkan dalam program penyuluhan dan pendidikan tentang kekerasan terhadap anak. Mereka juga dapat dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan serta cara yang tepat untuk melaporkannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempelajari *political will* pemerintah dalam aspek lain seperti dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, kebijakan perlindungan lingkungan hidup, serta upaya penanggulangan kejahatan dan korupsi. Hal ini bertujuan agar dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai pentingnya *political will* dalam suatu kebijakan atau program.